BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu tentang “Hak Opsi dalam Perkara Waris Hubungannya dengan Kompetensi Peradilan Agama”, maka penulis menyimpulkan:

1. Bahwa Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berhak memeriksa dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan kompetensi absolut dari badan peradilan tersebut.
2. Hak opsi dalam perkara waris yang tercantum dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, memberikan peluang kepada orang Islam untuk mengajukan perkaranya apakah diajukan ke Pengadilan Agama yang menggunakan hukum Islam ataukah ke Pengadilan Negeri yang menggunakan hukum Barat atau hukum Adat. Pengajuannya dilakukan sebelum para pihak yang berperkara mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Ketika para pihak telah mengajukan perkaranya tersebut ke salah satu badan peradilan, maka dianggap para pihak telah melakukan hak opsi-nya terhadap badan peradilan yang telah dipilihnya itu.
3. Ditinjau dari hukum Islam dan dari yuridis formal, mengenai hak opsi ini tidak dapat dibenarkan. Hak opsi terkesan masih ada pengaruh dari teori resepsi karena

memungkinkan bagi orang yang beragama Islam untuk tidak memberlakukan hukum agama yang dianutnya. Hal ini bertentangan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945. Hak opsi berpengaruh terhadap efektifitas peradilan, memakan waktu yang lama, proses berbelit-belit serta biaya yang tinggi.

B. Saran-saran

Atas dasar kajian dari berbagai segi tentang ketentuan adanya hak opsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa hak opsi tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun serta merupakan kendala terhadap jalannya peradilan, maka diharapkan kepada lembaga-lembaga yang berkompeten untuk dapat meluruskan dan meninjau kembali apa yang dimaksud dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
2. Hak opsi sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut kiranya perlu dihilangkan, sehingga perkara di bidang kewarisan sebagaimana perkara-perkara tertentu dibidang lainnya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.
3. Kesadaran ber hukum Islam perlu ditingkatkan selain di kalangan umat Islam, juga di kalangan para tokoh dan pejabat khususnya yang berkaitan dengan peradilan yang beragama Islam. Dalam hubungan ini, hakim Muslim yang menghadapi perkara-perkara warisan, wasiat dan hibah di Pengadilan Negeri, misalnya,

seyogyanya menyarankan, karena panggilan imannya, agar orang-orang yang berperkara itu memilih hukum kewarisan, wasiat dan hibah Islam saja. Demikian juga hendaknya sikap para Penasehat Hukum, adalah menjadi kewajiban imannya untuk memberi nasehat kepada orang-orang yang berperkara yang datang kepadanya untuk memilih kewarisan, wasiat dan hibah Islam dalam penyelesaian sengketa mereka.